

**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAKSAAN
DENGAN KEKERASAN TERHADAP SUPIR TRUK
YANG INGIN MELINTAS**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid/2020)

SAIFUL BAHRI^{*}
Dr.IBNU AFFAN,SH.,M.Hum^{**}
Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum^{***}

ABSTRAK

Premanisme adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang artinya sebagai orang bebas, merdeka atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak lainnya, yang mendapatkan penghasilan dari tindakan pemerasan kepada masyarakat.

Permasalahannya adalah bagaimana aturan tindakan pemaksaan dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindakan pemaksaan dengan kekerasan serta bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid/2020

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Dari hasil penelitian bahwa aturan tindakan pemaksaan dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan, kekerasan dan ancaman, kekerasan ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan pemaksaan dengan kekerasan Dalam Pasal 368 KUHPidana tindak pidana pemerasan Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana itu. Pertimbangan hakim atas tindakan pemerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid/202021, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut

Kata Kunci : Tindakan, Pemaksaan, Kekerasan.

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

^{**} Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

^{***} Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**LEGAL REVIEW OF VIOLENT ACTIONS AGAINST TRUCK
DRIVERS THOSE WHO WANT TO CROSS
(Case Study of Supreme Court Decision Number 85 K/Pid/2020)**

**SAIFUL BAHRI^{*}
Dr.IBNU AFFAN,SH.,M.Hum^{**}
Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum^{***}**

Thuggish is a term that comes from the Dutch language, namely *vrijman* which means as a free person, independent or not having work ties with the government or other parties, who earn income from acts of extortion against the public.

The problem is how are the rules for acts of coercion by force in statutory regulations, what is the legal responsibility for acts of coercion by force and how are the judges' considerations of acts of extortion in the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid/2020

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing the science of law with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which then the data will be analyzed in a juridical manner.

From the results of the research that the rules for coercion by force in legislation, violence and threats, violence are intended to prepare, facilitate or in the event of being caught red-handed makes it possible to escape. Legal responsibility for acts of coercion with violence In Article 368 of the Criminal Code, the criminal act of extortion The provisions of Article 365 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) apply to this crime. The judge's consideration of extortion in the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid/202021, the East Kalimantan High Court Decision in Samarinda which strengthens the Tenggara District Court Decision on the proven indictment of the Public Prosecutor Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code and the conviction of the Defendant in *casu* has been appropriate and correct, Rejecting the cassation request from the Cassation Petitioner

Keywords: Action, Coercion, Violence.

^{*} Students of the Master of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{**} Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{***} Advisor II Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra